



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-24.KP.03.04 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-KP.10.02-2963 tanggal 06 Juli 2020 hal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1418);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Juli 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



MOHAMMAD HAYAT HENRI  
NIP. 196101291985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-24.KP.03.04 TAHUN 2020  
TANGGAL : 08 Juli 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	EARIAS WIRAWAN, S.E., M.Si. NIP. 197302121999031011	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati	Analisis Keimigrasian Muda pada Direktorat Jenderal Imigrasi	395
2.	BAMBANG TRIYONO, S.E. NIP. 197812222003121001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	Analisis Keimigrasian Muda pada Direktorat Jenderal Imigrasi	332
3.	PURWASARY, S.Kom. NIP. 197604252006042001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Kesehatan pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	Analisis Keimigrasian Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	332
4.	MAULID YUSTISIA IRIANDI, S.H. NIP. 198201082001121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	Analisis Keimigrasian Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya	300
5.	DENNI JUMANSON NAIBAHO, S.H., M.H. NIP. 198002062003121001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam	Analisis Keimigrasian Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	300
6.	MUHAMMAD RIZAL NASUTION, S.H. NIP. 198107132000121003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	Analisis Keimigrasian Muda pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	300
7.	HOUSNI, A.Md.Im., S.H. NIP. 198505282003121004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Lantas dan Statuskim pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali	Analisis Keimigrasian Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	200

1	2	3	4	5	6
8.	DESIANA HARYATI, A.Md.Im., S.Sos. NIP. 198112192000022001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Seksi Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok	Analisis Keimigrasian Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok	195
9.	MIRNA YUNIARTI, A.Md.Im., S.I.P. NIP. 198106242000022001	Penata (III/c)	Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok	Analisis Keimigrasian Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	190
10.	DEWI WAHYUNI, S.H. NIP. 197906162006042002	Penata (III/c)	Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati	Analisis Keimigrasian Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	175

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



MOHAMMAD HAYAT HENRI  
NIP. 196101291985031001